

Academic versus Vocational Orientation: A Comparison of Guidance and Counseling Program Management in Senior High Schools and Vocational High Schools (Literature Study)

Resty Tri Mahanani

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: 24010014144@mhs.unesa.ac.id

Info Artikel

Submitted: 05 Oktober 2025

Revised : 11 Oktober 2025

Accepted: 21 Oktober 2025

Published: 16 Desember 2025

Keywords: guidance and counseling management; vocational education; comparative studies; academic

Kata Kunci: manajemen Bimbingan dan Konseling; pendidikan kejuruan; studi komparatif; akademik

Abstract

Rooted in the differences in educational orientation between senior high schools (academic) and vocational high schools (vocational), there is a need for different approaches to guidance and counseling (BK) management. A systematic literature review was conducted to analyze the differences in the implementation of BK management in senior high schools and vocational high schools and to formulate a more responsive management model. The results of the study show that even though the same management framework (planning, organizing, acting, controlling) is used, the implementation of BK management at both levels of education is still not fully adaptive to the characteristics of each orientation. The most significant gap lies in the functions of evaluation and accountability. At the high school level, although the evaluation process is often simple and focuses on administrative output, this practice is still considered to be in line with its academic orientation. However, at the vocational school level, the evaluation function is not only technically weak but also irrelevant to the vocational orientation. This condition shows that BK management in Indonesia needs to be strengthened so that it is truly adaptive to the academic needs of high school students and the vocational needs of vocational school students.

Abstrak

Berakar dari perbedaan orientasi pelaksanaan pendidikan antara SMA (akademik) dan SMK (vokasional) menuntut adanya pendekatan manajemen Bimbingan dan Konseling (BK) yang berbeda. Dengan kajian study literatur sistematis untuk menganalisis perbedaan pengimplementasian manajemen BK di SMA dan SMK serta merumuskan model manajemen yang lebih responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menggunakan kerangka manajemen yang sama (planning, organizing, actuating, controlling), implementasi manajemen BK di kedua jenjang pendidikan masih belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik masing-masing orientasi. Kesenjangan paling signifikan terletak pada fungsi evaluasi dan akuntabilitas. Pada tingkat SMA, meskipun proses evaluasi seringkali bersifat sederhana dan berfokus pada output administratif, namun praktik ini masih dianggap selaras dengan orientasi akademiknya. Namun pada tingkat SMK fungsi evaluasi tidak hanya lemah secara teknik tetapi tidak relevan dengan orientasi vokasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen BK di Indonesia perlu diperkuat agar benar-benar adaptif terhadap kebutuhan akademik peserta didik SMA maupun kebutuhan vokasional peserta didik SMK.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Oleh karena itu diharapkan melalui pendidikan, setiap individu dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk berperan aktif di masyarakat dan membangun kualitas hidup yang lebih baik. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun (2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Melalui beberapa aspek penting, mulai dari kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, hingga akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (Pangesti & Kholis, 2024). Sehingga di Indonesia, sekolah dianggap sebagai pendidikan formal menyelenggarakan proses pembelajaran secara terencana dan terstruktur untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pengembangan peserta didik.

Dari jenis pelaksanaannya pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui tiga jalur utama, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal, yang bersama-sama dimaksudkan untuk mengembangkan bakat, potensi, dan kemampuan peserta didik dalam berbagai aspek kehidupan. Machfudz (2022) menjelaskan bahwa pendidikan formal di sekolah memiliki tujuan membantu peserta didik agar potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dengan baik. Di antara ketiga jalur ini, pendidikan menengah memegang posisi strategis sebagai fase transisi yang menentukan arah masa depan. Pada jenjang ini, siswa diperkaya pengetahuan kognitif, sekaligus dibimbing mengambil keputusan penting yang akan memengaruhi pilihan mereka, baik itu melanjutkan studi ke perguruan tinggi maupun langsung memasuki dunia kerja.

Menurut Mardiyati & Yuniawati (2015), sistem pendidikan menengah di Indonesia terbagi menjadi dua jalur utama dengan orientasi yang berbeda. Sekolah Menengah Atas (SMA) dirancang dengan kurikulum yang berfokus pada akademik, utamanya untuk mempersiapkan peserta didik melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Sebaliknya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki orientasi vokasional yang kuat, yang bertujuan untuk membekali lulusan dengan keterampilan teknis spesifik agar siap memasuki dunia industri atau dunia kerja. Perbedaan fundamental dalam orientasi ini secara otomatis memengaruhi jenis layanan pendidikan yang

disediakan. Untuk menunjang keberhasilan dan optimalisasi pengembangan peserta didik di kedua jalur tersebut, layanan Bimbingan dan Konseling (BK) menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan menengah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014, tujuan utama layanan BK adalah memfasilitasi peserta didik agar mencapai kematangan dan kemandirian optimal dalam kehidupan serta berhasil menuntaskan tugas-tugas perkembangan mereka, yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier (2014).

Bimbingan dan konseling merupakan merupakan program pendidikan krusial di sekolah, yang perannya sangat penting untuk memajukan mutu sekolah dan menjadi elemen pembaruan dalam mengembangkan potensi generasi muda (Pangesti & Kholis, 2024). Dalam lingkungan sekolah, layanan BK bertujuan membantu siswa mengembangkan diri, menguasai kebiasaan belajar yang efektif, serta mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. BK menjadi komponen integral guna menciptakan pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien (Mutia, 2021 dalam Syahri et al., 2024). Secara konseptual, BK didefinisikan sebagai proses pemberian bantuan profesional melalui interaksi tatap muka konselor dan konseli. Tujuannya adalah membantu individu memahami diri, mengatasi masalah, memanfaatkan potensi, dan merencanakan masa depan lebih terarah demi mencapai kesejahteraan hidup optimal (Hasmin et al., 2016).

Guna mencapai tujuan tersebut, program BK di sekolah harus disusun sistematis dan komprehensif. Penting untuk menggarisbawahi, dalam pedoman kurikulum berbasis kompetensi bidang BK mengisyaratkan bahwa sistem layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak mungkin tercipta, terselenggara, dan tercapai dengan baik apabila tidak didukung oleh suatu sistem pengelolaan (manajemen) yang profesional (Rohmah, 2019). Oleh karena itu, penyusunan program BK idealnya merujuk pada pedoman kurikulum namun harus didasarkan pada kebutuhan nyata lapangan dan tahapan perkembangan peserta didik. Program komprehensif ini wajib memuat visi, misi, tujuan, strategi pelaksanaan, personel, dukungan fasilitas, dan rencana evaluasi untuk menjamin mutu layanan. Dari perspektif manajerial, layanan BK yang dikelola dengan baik memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter siswa, meningkatkan kesiapan mereka menghadapi tantangan, dan meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang (Sirani & Santoso, 2025).

Manajemen layanan BK sendiri mencakup serangkaian fungsi manajerial klasik, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/pengarahan, dan pengendalian (planning, organizing,

actuating, controlling) (Zulkarnai dalam Siregar, 2024). Sama dengan Prayitno yang mengatakan, dalam sebuah pengelolaan bimbingan dan konseling pada dasarnya terfokus pada empat pilar kegiatan yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan, Terry (Imam Machali & Ara Hidayat, 2002 dalam Daempal, 2021) menegaskan bahwa keempat fungsi ini merupakan subaktivitas fundamental yang harus dijalankan secara terpadu dalam setiap proses manajemen. Dalam konteks BK, fungsi-fungsi tersebut diwujudkan melalui perencanaan kegiatan layanan, pengorganisasian personel dan sumber daya, mobilisasi dan pengarahan guru BK/konselor serta pemangku kepentingan lainnya, serta evaluasi program secara berkala (Sugiyono, 2012 dalam Suminingsih, 2019).

Diaty et al. (2022) dalam artikelnya menulis bahwasannya manajemen diperlukan tidak hanya untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan aktivitas yang dilakukan, tetapi juga untuk mengelola potensi konflik kepentingan di antara berbagai pihak yang terlibat, seperti kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, siswa, orang tua, dan komite sekolah. Ia juga menambahkan, dari sudut pandang efisiensi dan efektivitas, manajemen yang baik memastikan bahwa input (sumber daya) yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan keluaran (output) dan dampak (outcome) yang maksimal.

Meskipun Bimbingan dan Konseling (BK) diakui sebagai program krusial, berbagai kajian menunjukkan bahwa persoalan manajemen pendidikan, khususnya dalam layanan BK di Indonesia, masih menjadi akar krisis mutu pendidikan. Profesionalitas manajemen belum sepenuhnya terwujud sesuai harapan. Sebagai contoh, temuan Sinaga (2022) mengungkap adanya kesenjangan pemahaman integrasi manajemen pelayanan BK di kalangan guru BK/konselor, yang berakibat pada kurang optimalnya dukungan stakeholder sekolah terhadap implementasi layanan. Sejalan dengan hal tersebut, Zulkarnain (dalam Syahri et al., 2024) mencatat berbagai bentuk kelemahan manajemen BK, termasuk ketiadaan program yang jelas, perbedaan pola pelayanan antar guru BK dalam satu sekolah, hingga tidak adanya format baku atau panduan operasional dalam melaksanakan layanan. Kelemahan manajerial ini menghambat BK untuk berkontribusi maksimal pada tujuan pendidikan.

Kompleksitas isu manajemen yang menghambat efektivitas layanan Bimbingan dan Konseling (BK) menuntut adanya solusi yang terfokus dan berbasis bukti. Untuk mengatasi akar masalah ini, sangat penting untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konstruksi dan implementasi manajemen program BK di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK), ditinjau dari perspektif teoretis maupun empiris. Kebutuhan ini mendesak mengingat fungsi strategis BK dalam menentukan arah masa depan peserta didik, yang mana pelayanannya tidak akan optimal tanpa sistem pengelolaan mutu yang profesional. Oleh karena itu, langkah awal yang kritis adalah menguraikan dan memetakan model manajemen yang sedang berjalan saat ini.

Mengingat perbedaan fundamental pada orientasi kedua jenis sekolah, maka diperlukan analisis komparatif mendalam terhadap manajemen program BK keduanya. Kajian ini melampaui sekadar deskripsi perbedaan. Tujuannya adalah menghasilkan rekomendasi model manajemen program BK yang adaptif dan responsif terhadap karakteristik spesifik dan kebutuhan unik pada masing-masing jenjang pendidikan. Dengan membandingkan praktik terbaik dan kelemahan manajemen program BK yang berorientasi akademik dengan yang berorientasi vokasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan, penyusunan panduan operasional, dan pada akhirnya, peningkatan kualitas layanan BK secara menyeluruh.

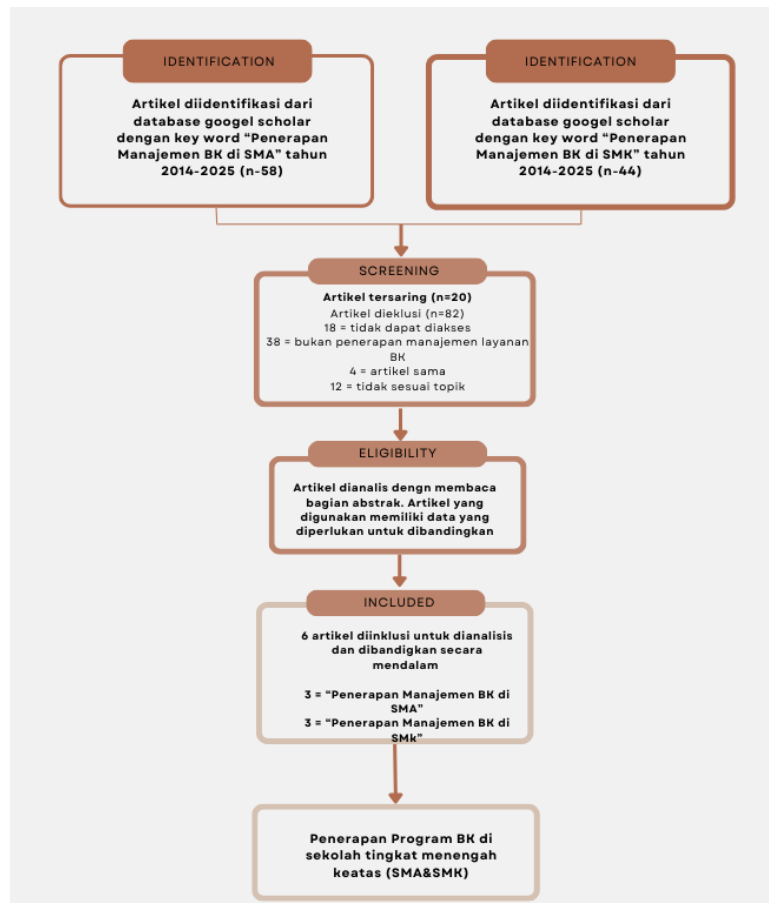
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi literatur komparatif dengan pendekatan sistematis. Pendekatan ini dirancang untuk menganalisis dan membandingkan secara mendalam model manajemen program Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan berorientasi akademik (SMA) dan berorientasi vokasional (SMK). Studi literatur komparatif dipahami sebagai bentuk tinjauan pustaka yang secara khusus memfokuskan diri pada perbandingan dua atau lebih konsep, model, praktik, atau entitas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Systematic Literature Review (SLR) yang menuntut proses kajian pustaka dilaksanakan secara terencana, transparan, dan dapat direplikasi.

Proses penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengkajian, evaluasi, dan interpretasi terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan dengan fokus kajian. Peneliti menelaah artikel-artikel ilmiah yang berhubungan langsung dengan pertanyaan penelitian, yaitu: “Apakah perbedaan orientasi kebutuhan lanjutan di SMA dan SMK tercermin dalam perbedaan pelaksanaan manajemen layanan BK di kedua jenis sekolah tersebut?” Tinjauan dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan mengacu pada tahapan baku dalam SLR sebagaimana dikemukakan oleh Norlita et al., yang meliputi: (1) perumusan pertanyaan penelitian dan fokus komparasi, (2) pemetaan dan

penelusuran artikel yang relevan, (3) seleksi artikel melalui kriteria inklusi dan eksklusi, (4) penyajian serta pengolahan data temuan, dan (5) interpretasi hasil komparasi untuk merumuskan model manajemen BK yang lebih adaptif (Norlita et al., 2023). Dalam konteks ini, tinjauan sistematis dimaknai sebagai cara menelaah suatu masalah secara terarah dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih literatur yang relevan berdasarkan kriteria yang dirumuskan sebelumnya.

Pada tahap operasional, langkah pertama adalah penentuan tema dan fokus komparasi, yaitu “Orientasi Akademik versus Vokasional: Komparasi Manajemen Program Bimbingan dan Konseling di SMA dan SMK”. Pengumpulan data literatur dilakukan melalui penelusuran artikel di mesin pencari akademik seperti Google Scholar dan basis data ilmiah lainnya. Peneliti menggunakan dua kelompok kata kunci utama, yaitu “Penerapan Manajemen BK di SMA” dan “Penerapan Manajemen BK di SMK”, dengan pembatasan rentang tahun publikasi antara 2015 sampai 2025. Artikel yang ditemukan kemudian diseleksi secara berlapis dengan menelaah kesesuaian judul, abstrak, dan isi artikel terhadap fokus komparasi.



Gambar 1 Diagram alur proses eksklusi dan inklusi artikel dalam tahapan Systematic Literature Review (n = jumlah artikel) sumber(Norlita et al., 2023)

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Setelah melakukan penelusuran artikel ilmiah melalui kanal Google Scholar ditemukan 6 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dari pengkajian 3.200 artikel terkait manajemen bimbingan dan konseling yang dipublikasikan antara tahun 2014 hingga 2025, yaitu sebagai berikut.

Table 1. Hasil Review Artikel

Nama Pengarang	Tahun	Tujuan Penelitian	Partisipan	Deain dan metode pengambilan data	Temuan	Implikasi
Surya Adji Pangesti & Mohammad Maulana Nur Kholis	(2024)	Menganalisis manajemen layanan bimbingan dan konseling (BK) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri I Gondang.	Kepala Sekolah, Koordinator BK, Guru BK, dan Siswa SMA Negeri I Gondang	Desain: Kualitatif dengan pendekatan studi kasus (<i>case study</i>). Metode Pengambilan Data: 1. Wawancara (mendalam dengan kepala sekolah, koordinator BK, dan guru BK). 2. Observasi (mengamati langsung aktivitas layanan BK). 3. Dokumentasi (arsip program BK, laporan kegiatan, dan data prestasi)	1. Perencanaan: Dimulai dengan asesmen kebutuhan (AKPD/IKMS), penyusunan program tahunan & semester, serta pembagian tugas guru asuh. 2. Pelaksanaan: Meliputi layanan dasar (klasikal), layanan responsif (konseling individu/kelompok), peminatan, dan dukungan sistem (kolaborasi dengan wali kelas & orang tua, <i>home visit</i>). 3. Evaluasi: Dilakukan evaluasi proses dan hasil, kemudian dilaporkan dalam laporan pelaksanaan program (Lapelprog). 4. Dampak: Manajemen yang terstruktur berdampak positif pada peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa.	Penerapan fungsi manajemen (POAC) yang disiplin dalam layanan BK sangat krusial untuk mendukung pencapaian prestasi siswa. Sekolah perlu mengintegrasikan layanan BK dengan seluruh komponen sekolah (guru mapel, wali kelas) agar intervensi terhadap masalah belajar siswa lebih efektif.
Yoseph Silvanus Daempal	(2021)	Mengetahui penerapan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan)	Kepala Sekolah, Guru BK, Guru Mata Pelajaran, dan Tenaga Pendidik di SMA Bunda Hati Kudus.	Desain: Deskriptif Kualitatif. Metode: 1. Wawancara (dengan kepala sekolah dan guru-guru terkait). 2. Observasi (pengamatan	1. Perencanaan: Disusun sistematis melalui rapat melibatkan yayasan & stakeholder, berbasis visi-misi dan asesmen kebutuhan (<i>need assessment</i>). 2. Pengorganisasian: Kepala	Penerapan fungsi manajemen (POAC) yang konsisten terbukti efektif meningkatkan mutu pribadi, sosial, akademik, dan karir siswa. Namun,

Academic versus Vocational Orientation: A Comparison of Guidance and Counseling Program Management in Senior High Schools and Vocational High Schools (Literature Study)

Resty Tri Mahanani

		dalam layanan bimbingan dan konseling di SMA Bunda Hati Kudus Jakarta.		langsung aktivitas layanan). 3. Dokumentasi (studi arsip dan dokumen pendukung sekolah).	sekolah mendelegasikan wewenang kepada tim BK. Meski belum ada struktur organisasi BK yang terpisah secara khusus, pembagian tugas (<i>job description</i>) sudah dilakukan melalui SK Kepala Sekolah. 3. Penggerakan: Dilakukan melalui komunikasi intensif, rapat rutin bulanan, dan motivasi dari kepala sekolah kepada seluruh staf. 4. Pengawasan: Dilakukan oleh kepala sekolah (supervisi) dan dinas pendidikan secara berkala untuk memastikan layanan berjalan sesuai rencana.	komunikasi antar personel (wali kelas, guru BK, orang tua) perlu terus ditingkatkan untuk menghindari miskomunikasi dalam penanganan siswa bermasalah.
Ima Rahmawati, Rinawati, Muzhir Ihsan, Hana Lestari, dan Nana Supriatna	(2023)	Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan manajemen layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Tenjolaya dengan meninjau penerapan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi) dalam layanan BK di sekolah tersebut.	Subjek utama penelitian adalah satu orang guru BK/konselor di SMA Negeri 1 Tenjolaya; data juga diperkuat dengan informasi dari dokumen dan kondisi layanan BK di sekolah.	Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara rinci pelaksanaan manajemen layanan BK di sekolah. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kegiatan dan administrasi layanan BK.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Tenjolaya telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan layanan BK tercermin dari penerapan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan program, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan layanan, hingga evaluasi dan tindak lanjut yang terstruktur. Secara umum, fungsi-fungsi manajemen tersebut sudah diintegrasikan dalam praktik	Temuan ini mengisyaratkan bahwa sekolah lain dapat menjadikan praktik di SMA Negeri 1 Tenjolaya sebagai rujukan dalam memperkuat manajemen BK, khususnya dalam memastikan fungsi-fungsi manajemen dijalankan secara konsisten untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap siswa.

Academic versus Vocational Orientation: A Comparison of Guidance and Counseling Program Management in Senior High Schools and Vocational High Schools (Literature Study)

Resty Tri Mahanani

					layanan BK sehingga program dapat dijalankan sesuai tujuan yang ditetapkan sekolah.	
Herlina Hasmin, Sumadi, dan Riswandi.	(2016)	Mendesripsikan manajemen layanan bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Kebun Tebu yang meliputi perencanaan program, pengorganisasian petugas, pelaksanaan kegiatan layanan, dan pengawasan hasil layanan.	Kepala sekolah sebagai informan utama, diikuti wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, koordinator BK, guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan siswa sebagai sumber data tambahan.	Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami secara mendalam penerapan manajemen layanan BK di sekolah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam (<i>in-depth interview</i>), dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik <i>snowball sampling</i> , sedangkan analisis data mengikuti model Miles & Huberman: reduksi data, display data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.	<p>1. Perencanaan: Didasarkan pada analisis kebutuhan (DCM, angket, sosiometri), kemudian disosialisasikan kepada stakeholder dan dituangkan dalam program tahunan, semester, dan bulanan yang selaras dengan visi misi sekolah.</p> <p>2. Pengorganisasian: Dilakukan oleh koordinator BK melalui pembagian tugas antar-guru BK (diformalisasi dalam SK Kepala Sekolah), dengan pembagian tanggung jawab per jurusan dan tingkat kelas, serta koordinasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran.</p> <p>3. Pelaksanaan: Meliputi layanan inti (penempatan, layanan responsif, konseling individu/kelompok) dan kegiatan pendukung (home visit, alih tangan kasus, cyber counseling), namun seringkali dilaksanakan secara insidental tanpa alokasi jam pelajaran khusus BK.</p> <p>4. Pengawasan & Evaluasi: Dilakukan melalui</p>	Penerapan fungsi manajemen POAC (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan) yang sistematis dalam layanan BK dapat mendukung pengembangan siswa secara optimal pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier. Namun ketiadaan jam pelajaran khusus BK dan sifat pelaksanaan yang insidental menunjukkan perlunya penguatan kebijakan sekolah, dukungan sarana-prasarana, dan koordinasi lintas <i>stakeholder</i> agar layanan BK lebih efektif dan berkelanjutan.

Academic versus Vocational Orientation: A Comparison of Guidance and Counseling Program Management in Senior High Schools and Vocational High Schools (Literature Study)

Resty Tri Mahanani

					pencatatan kegiatan harian/mingguan dan dirangkum dalam laporan bulanan, semester, dan tahunan. Hasil evaluasi digunakan untuk tindak lanjut perbaikan dan pengembangan layanan.	
Ahmad Faris Al Anshari	(2018)	Mengetahui kelebihan dan kekurangan program BK di SMK, serta menggambarkan mekanisme manajemen program BK komprehensif (berdasarkan model ASCA) meliputi landasan, sistem penyampaian, sistem manajemen, dan akuntabilitas, agar dapat diperbaiki dan dikembangkan lebih baik.	Konselor/guru BK pada tiga SMK di Jakarta: SMKN 31 Jakarta, SMK Budi Mulia Utama, dan SMK Muhammadiyah 6 Jakarta sebagai responden utama pengisian angket audit program BK komprehensif.	Desain penelitian menggunakan metode deskriptif jenis survei untuk menggambarkan pelaksanaan sistem manajemen layanan BK di tiga SMK tanpa perlakuan eksperimen. Instrumen pengumpulan data berupa angket non-tes ASCA National Model Program Audit (115 butir, 17 indikator dalam 4 aspek: landasan, sistem penyampaian, sistem manajemen, dan akuntabilitas) yang telah diterjemahkan dan diadaptasi ke konteks BK Indonesia. Pengisian angket memotret tingkat keterlaksanaan program BK dengan kategori “tidak ada”, “dalam proses”, “baru selesai”, “terlaksana”, dan “tidak menjawab”.	Tidak ada satu pun sekolah yang mencapai kategori “tinggi” dalam keterlaksanaan sistem manajemen layanan BK komprehensif berdasarkan skor audit ASCA. SMK Muhammadiyah 6 Jakarta berada pada kategori rendah (skor 133; 39%), sedangkan SMKN 31 Jakarta (skor 228; 66%) dan SMK Budi Mulia Utama (skor 158; 46%) berada pada kategori sedang, dengan SMKN 31 memiliki skor tertinggi di semua aspek (landasan, sistem penyampaian, sistem manajemen, dan akuntabilitas). SMKN 31 sudah menyusun program BK cukup lengkap dan memiliki data pelaksanaan yang relatif baik, sementara di dua sekolah lain banyak indikator masih pada status “dalam proses” atau “tidak	Program BK komprehensif di SMK memerlukan penguatan serius pada sistem manajemen dan akuntabilitas agar benar-benar menjadi program yang terencana, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi, bukan sekadar aktivitas insidental. Guru BK perlu peningkatan kompetensi dalam menyusun program BK sesuai standar komprehensif (landasan, sistem penyampaian, manajemen, dan akuntabilitas) serta dukungan kebijakan sekolah agar tidak dibebani tugas non-BK yang menghambat pengembangan program. Sekolah dan

Academic versus Vocational Orientation: A Comparison of Guidance and Counseling Program Management in Senior High Schools and Vocational High Schools (Literature Study)

Resty Tri Mahanani

					ada”, program BK belum tersusun sesuai standar, dokumentasi lemah, dan layanan BK sering terbebani tugas di luar peran konselor (misalnya tugas ketertiban). Secara umum, aspek akuntabilitas (pelaporan hasil, evaluasi kinerja, audit program) memperoleh skor paling rendah di tiga sekolah, menunjukkan lemahnya budaya evaluasi dan pertanggungjawaban program BK.	pemangku kebijakan disarankan menambah jumlah guru BK, memperjelas peran konselor (dipisahkan dari tim ketertiban), menyediakan dukungan finansial dan fasilitas yang memadai, serta mendorong penggunaan data dan teknologi (IT) untuk monitoring dan pelaporan program BK.
Fauzi Nur Ilahi, Gantina Komalasari, dan Dede Rahmat Hidayat.	(2018)	Mendeskripsikan keterlaksanaan manajemen program bimbingan dan konseling pada tiga SMK Negeri di DKI Jakarta, khususnya terkait landasan (filosofi, misi, tujuan, standar kompetensi), sistem penyampaian (layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif, dukungan sistem), sistem manajemen	Guru bimbingan dan konseling (konselor sekolah) di tiga SMK Negeri: SMKN 6 Jakarta, SMKN 29 Jakarta, dan SMKN 41 Jakarta sebagai responden utama pengisian angket dan wawancara	Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik survei untuk memperoleh gambaran implementasi sistem manajemen BK di SMK. Instrumen utama berupa angket (checklist) kepada guru BK dengan kategori jawaban “Tidak ada, Dalam proses, Baru selesai, Terlaksana, Tidak menjawab” serta wawancara terstruktur untuk mengklarifikasi hasil angket dan menggali pelaksanaan program BK lebih mendalam. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan nilai rata-	Secara umum, manajemen program BK di ketiga SMK Negeri DKI Jakarta belum terlaksana optimal, meski seluruh sekolah sudah memiliki program dan beberapa komponen manajemen berjalan. Pada aspek landasan (filosofi, misi, tujuan, standar kompetensi ASCA/ABKIN), SMKN 41 memiliki persentase tertinggi (misalnya misi dan tujuan mencapai 100%), sedangkan SMKN 6 jauh lebih rendah (misi hanya 25%, tujuan 45%), menunjukkan variasi kuat antar sekolah. Layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif,	Diperlukan penguatan mekanisme manajemen program BK di SMK, mulai dari kejelasan wilayah kerja dan tugas pokok konselor sampai dengan pengembangan struktur dan prosedur manajemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut) yang berbasis data kebutuhan siswa. Sekolah perlu membangun kerja sama internal yang kuat antara guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, OSIS, dan unsur administrasi,

Academic versus Vocational Orientation: A Comparison of Guidance and Counseling Program Management in Senior High Schools and Vocational High Schools (Literature Study)

Resty Tri Mahanani

		(dewan penasihat, monitoring, data, kurikulum, kalender) dan akuntabilitas (laporan hasil, evaluasi, audit program).		rata persentase ketercapaian tiap indikator (filosofi, misi, tujuan, layanan dasar, dukungan sistem, monitoring, kalender, laporan hasil, evaluasi, audit program, dan lain-lain) di masing-masing sekolah.	dan dukungan sistem umumnya telah ada namun pelaksanaannya belum menyeluruh; layanan dasar dan layanan responsif relatif tinggi, sedangkan dukungan sistem dan perencanaan individual lebih lemah. Pada aspek sistem manajemen dan akuntabilitas (dewan penasihat, monitoring, klasifikasi data, kurikulum, kalender, laporan hasil, evaluasi, dan audit program), ketiga sekolah masih banyak kekurangan, terutama dalam evaluasi kinerja konselor dan pelaporan hasil program secara sistematis.	serta kerja sama eksternal dengan orang tua, komite sekolah, dan tenaga ahli, agar program BK mendapat dukungan dan tidak berjalan sendiri. Peneliti juga menekankan pentingnya pengembangan diri guru BK secara berkelanjutan (pelatihan, workshop, MGBK) agar mampu menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengaudit program BK.
--	--	--	--	---	--	---

Pembahasan

Hasil telaah terhadap enam artikel yang menyoroti manajemen program Bimbingan dan Konseling (BK) pada jenjang SMA dan SMK mengindikasikan bahwa pelaksanaannya pada kedua tipe sekolah umumnya telah mengacu pada fungsi-fungsi dasar manajemen, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Meskipun demikian, kualitas implementasinya menunjukkan variasi yang cukup nyata, terutama terkait kelengkapan dokumen, sistematika prosedur, serta tingkat profesionalitas praktisi yang terlibat. Selain itu, tampak adanya perbedaan penekanan layanan yang merefleksikan karakteristik dan orientasi masing-masing sekolah.

Untuk memperjelas pola penerapan manajemen program Bimbingan dan Konseling (BK) pada dua jenis satuan pendidikan, yakni SMA dan SMK, diperlukan pemetaan yang sistematis terhadap fungsi-fungsi manajemen yang digunakan. Pemetaan ini penting untuk menunjukkan sejauh mana kedua sekolah menerapkan prinsip manajemen yang serupa, sekaligus mengidentifikasi perbedaan penekanan layanan yang muncul akibat karakteristik dan orientasi pendidikan masing-masing. Tabel berikut merangkum kesamaan fungsi manajemen program BK di SMA dan SMK, sekaligus menyoroti penekanan fungsional yang berbeda sesuai orientasi sekolah.

Table 2. Fungsi Manajemen program BK di SMA dan SMK

Fungsi Manajemen	Deskripsi Umum (Persamaan)	Penekanan Khusus di SMA (Akademik)	Penekanan Khusus di SMK (Vokasional)
Perencanaan	Proses sistematis yang didasarkan pada analisis kebutuhan (<i>need assessment</i> / AKPD/IKMS) dan selaras dengan visi-misi sekolah.	Asesmen kebutuhan fokus pada persiapan kelanjutan studi dan pemilihan jurusan/peminatan akademik.	Penyusunan program melibatkan rapat dengan yayasan dan <i>stakeholder</i> industri; fokus pada persiapan karir dan praktik kerja.
Pengorganisasian	Pendelegasian wewenang dan	Pembagian tugas utama difokuskan pada	Pembagian tugas dan tanggung jawab sering

Academic versus Vocational Orientation: A Comparison of Guidance and Counseling Program Management in Senior High Schools and Vocational High Schools (Literature Study)

Resty Tri Mahanani

	pembagian tugas (job description formal melalui SK Kepala Sekolah) di antara tim BK.	pengampu kelas/tingkat untuk memudahkan koordinasi peminatan dan akademik.	dikelompokkan per jurusan (vokasi) spesifik dan tingkat kelas.
Pelaksanaan Layanan	Meliputi empat komponen utama: Layanan Dasar (klasikal), Layanan Responsif (konseling individu/kelompok), Perencanaan Individual, dan Dukungan Sistem.	Penekanan kuat pada Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual yang mendukung transisi ke Perguruan Tinggi (termasuk <i>home visit</i>).	Penekanan pada Layanan Penempatan (PKL, kerja), integrasi <i>cyber counseling</i> , dan pemecahan masalah yang relevan dengan dunia kerja (meski sering insidental).
Pengawasan & Evaluasi	Dilakukan pengawasan berkala (supervisi) dan evaluasi program (proses dan hasil).	Evaluasi difokuskan pada ketercapaian tujuan akademik dan non-akademik siswa yang dilaporkan dalam Lapelprog.	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan; namun, aspek Akuntabilitas (pelaporan hasil, audit program) sering kali menjadi yang paling lemah.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan pada tabel diatas, manajemen Bimbingan dan Konseling (BK) di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada dasarnya menggunakan model manajemen yang serupa. Penggunaan fungsi manajemen konvensional mirip dengan siklus mutu PDCA, yang dimulai dengan perencanaan (Plan), implementasi (Do), evaluasi (Check), dan tindaklanjuti (Act) (KantorKu HRIS, 2025). Kesamaan pola ini merupakan berakar dari adanya standar kompetensi profesi konselor dan kerangka kerja layanan yang bersifat universal yang dirumuskan oleh organisasi profesi seperti ABKIN (Asosiasi

Bimbingan dan Konseling Indonesia) dan ASCA. ABKIN sendiri memandang bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, yang harus dipraktikkan dengan perilaku etis dan kompeten yang didasari nilai-nilai luhur profesi (2018). Oleh karena itu, prinsip-prinsip manajemen BK idealnya diterapkan secara konsisten di semua jenis sekolah. Implementasi yang baik dan terstruktur, seperti pada temuan kasus SMA Negeri 1 Tenjolaya, juga terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan prestasi siswa (Rahmawati et al., 2023).

Selain itu hasil temuan menunjukkan bahwa perbedaan terbesar terletak pada fungsi evaluasi dan akuntabilitas. Pada tingkat SMA, proses evaluasi seringkali sederhana dan lebih berfokus pada output administratif, tetapi praktik ini masih dianggap selaras dengan orientasi akademiknya, misalnya untuk memantau prestasi belajar siswa. Namun, masalah yang dihadapi pada tingkat SMK jauh lebih kompleks dan penting. Fungsi evaluasi tidak hanya tidak efektif secara teknis, seperti yang ditunjukkan oleh skor audit akuntabilitas BK yang rendah, tetapi juga tidak relevan dengan orientasi karir yang menjadi dasar pendidikan. Seberapa efektif BK dalam menyiapkan siswa memasuki dunia kerja? menjadi pertanyaan penting yang gagal ditangani oleh sistem evaluasi saat ini. Program BK di SMK menjadi tidak terukur dan kehilangan nilai pertanggungjawaban substantifnya karena tidak ada mekanisme untuk mengevaluasi hasil vokasional seperti penyerapan lulusan, kepuasan industri, atau kesesuaian kompetensi dengan pasar kerja. Akibatnya, tidak hanya terjadi perubahan pola manajemen, tetapi terjadi krisis manajemen yang serius di lingkungan kerja profesional. Kondisi ini menunjukkan dua masalah utama. Pertama, sistem manajemen BK tidak menyesuaikan diri dengan tuntutan akuntabilitas hasil karir yang melekat pada pendidikan vokasi. Kedua, profesionalisme pengelolaan rendah, yang ditunjukkan oleh praktik insidental dan pembebanan tugas non-BK pada konselor. Oleh karena itu, ketidaksesuaian ini harus secara khusus diatasi melalui pengembangan sistem evaluasi berbasis hasil vokasional dan penciptaan fondasi akuntabilitas yang peka terhadap karakteristik khusus SMK.

Sehingga meskipun Sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) tetap menerapkan siklus manajemen yang sama (PDCA atau fungsi manajemen konvensional) tetapi ada perbedaan orientasi lanjutan di mana SMA yang berorientasi akademik memang memusatkan layanannya pada pengembangan kapasitas belajar dan peminatan studi lanjut ke perguruan tinggi, sementara SMK menekankan layanan penempatan, praktik kerja industri, dan kesiapan kerja. Namun, perbedaan fungsional ini tidak diimbangi oleh perubahan struktural yang

dilakukan pada sistem manajemennya. Akibatnya, elemen-elemen pendukung seperti akuntabilitas program, profesionalisme konselor, dan konsistensi proses supervisi lebih penting daripada kerangka manajemennya. Fakta ini mengindikasikan bahwa orientasi kelembagaan hanya berdampak pada penekanan layanan fungsional, bukan pada penguatan struktur manajemen BK yang responsif. Pada akhirnya, model manajemen yang seragam ini tidak memenuhi kebutuhan unik masing-masing jenjang, yang menyebabkan banyak program BK, terutama SMK, tidak dapat memenuhi tuntutan dunia kerja. Dengan kata lain, metode manajemen yang sama mungkin tidak cocok untuk situasi yang berbeda. Sebaliknya, pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif diperlukan, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar manajemen yang efektif.

Rumusan model manajemen BK yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan, diperlukan dua arah rekomendasi yang saling melengkapi. Pertama, standarisasi manajemen perlu diterapkan secara konsisten di semua sekolah untuk memastikan akuntabilitas dan sistem pengelolaan yang sesuai dengan standar ABKIN/ASCA. Langkah strategis meliputi pengembangan instrumen evaluasi kinerja konselor yang baku, pelaporan hasil program yang terukur, serta pembentukan Dewan Penasihat BK untuk memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Hal ini menjadikan BK tidak hanya administratif, tetapi juga memiliki mekanisme kontrol mutu yang transparan.

Kedua, terkhusus pada SMK, diperlukan pendekatan yang adaptif dengan orientasi vokasional. Model harus mengintegrasikan tracer study lulusan sebagai alat evaluasi akuntabilitas karir, mengembangkan perencanaan individual berbasis data penyerapan lulusan di industri, serta menata ulang tugas Guru BK agar fokus pada pengembangan soft skills dan penempatan kerja. Agar konselor dapat bekerja secara profesional, mereka harus menghilangkan beban tugas yang tidak berkaitan dengan konseling, seperti ketertiban. Dengan menggabungkan standarisasi universal dan adaptasi vokasional, manajemen BK dapat menjadi lebih akuntabel, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan unik peserta didik di SMA dan SMK.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan orientasi kebutuhan lanjutan antara SMA dan SMK belum tercermin secara signifikan dalam pola manajemen BK, karena keduanya masih menerapkan struktur manajemen yang sama melalui siklus PDCA dan fungsi manajemen konvensional. Perbedaan hanya tampak pada penekanan layanan, sementara

mutu implementasi, akuntabilitas, dan profesionalisme pelaksanaan masih menjadi tantangan utama pada kedua jenis sekolah, terutama di SMK. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen BK di Indonesia perlu diperkuat agar benar-benar adaptif terhadap kebutuhan akademik peserta didik SMA maupun kebutuhan vokasional peserta didik SMK

DAFTAR PUSTAKA

- Daempal, Y. S. (2021b). *MANAJEMEN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA BUNDA HATI KUDUS JAKARTA*. 12(April), 1–13.
- Diaty, R., Arisa, A., Lestari, N. C. A., & Ngalimun. (2022). *IMPLEMENTASI ASPEK MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING*. 2, 38–46.
- Hasmin, H., Sumadi, & Riswandi. (2016). *MANAJEMEN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING STUDI KASUS SMK NEGERI 1 KEBUNTEBU LAMPUNG BARAT*. 1.
- INDONESIA, A. B. D. K. (2018). *Kode Etik Bimbingan dan Konseling di Indonesia* (pp. 1–24). PENGURUS BESAR ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA Sekretariat: Lab. Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. https://fajarjuliansyah.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/07/kode_etik_abkin-1.pdf
- Indonesia, R. (2003). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- KantorKu HRIS. (2025). *PDCA Adalah: Manfaat, Langkah, & Contoh Penerapannya*. Kantor.Id. <https://kantorku.id/blog/pdca-adalah/>
- Llahi, F. N., Komalasari, G., & Hidayat, D. R. (2018). *MANAJEMEN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING PADA SMK DKI JAKARTA*. *Jurnal Edukasi Bimbingan Dan Konseling*, 10, 66–77.
- Machfudz. (2022). *Manajemen Bimbingan dan Konseling dalam Upaya Meningkatkan Mutu Belajar Siswa*. 4(3), 805–813.
- Mardiyati, B. D., & Yuniawati, R. (2015). *PERBEDAAN ADAPTABILITAS KARIR DITINJAU DARI JENIS SEKOLAH (SMA DAN SMK)*. *EMPATHY, Jurnal Fakultas Psikologi*, 3(1), 31–41.
- Norlita, D., Nagea, P. W., Faradhila, S. A., Aryanti, M. P., Fakhriyah, A., F., & Ismayam, E. A.

- (2023). *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR) : Peran Pendidikan memiliki dampak yang sangat penting dalam perkembangan dan pengembangan diri individu , terutama dalam Upaya membangun bangsa dan negara . Tujuan utama dari pendidikan adalah menciptakan generasi yang.* 2(1).
- Pangesti, S. A., & Kholis, M. M. N. (2024). *Manajemen Layanan Bimbingan dan Konseling untuk Meningkatkan Prestasi Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang dimana akan mengalami perkem- Permasalahan yang terjadi pada pendidikan saat ini berkaitan dengan rendahnya prestasi belajar siswa yaitu salah.* 10(2), 178–192.
- Pendidikan, M., Kebudayaan, D. A. N., & Indonesia, R. (2014). *Permendikbud No. 111 2014.*
- Rahmawati, I., Rinawati, Ihsan, M., & Lestari, H. (2023). *PELAKSANAAN MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA NEGERI 1 TENJOLAYA. SAHID MENGABDI Jurnal-Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.*
<https://doi.org/https://doi.org/10.56406/jsm.v2i02.325>
- Rohmah, R. (2019). *Urgensi Manajemen Bimbingan Konseling dalam Melahirkan Peserta Didik Berkarakter.* *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia,* 102–115.
<https://doi.org/10.35316/jpii.v4i1.174>
- Sinaga, M. H. P., Qurrata, K., & Andini, V. (2022). *Pola Pelaksanaan Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Atas.* 4(1), 110–116.
- Sirani, A., & Santoso, Y. (2025). *Management of Guidance and Counseling Services (BK).* 5(2), 280–285. <https://doi.org/10.58737/jpled.v5i2.385>
- Siregar, E. P. (2024). *Urgensi Program Bimbingan Konseling di SLTA.* 1(June), 506–512.
- Suminingsih. (2019). *Manajemen Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Upaya Meningkatkan Mutu Belajar Pendahuluan.* 1(1), 131–143.
- Syahri, L. M., Handani, T., Media, A., & Syahrial. (2024). *URGENSI MANAJEMEN DALAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING.* 4(September), 177–188.